

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal terkait konfigurasi kondisi kausal yang membentuk Indeks Ketahanan Pangan yang optimal di wilayah Pulau Sumatera dan Jawa pada tahun 2024. Berdasarkan pengujian *Necessary Condition*, tidak terdapat satu pun kondisi tunggal, baik itu Harga Beras, Jumlah Pasar Rakyat, Persentase Penduduk Miskin, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan, maupun Luas Panen Padi yang secara mandiri menjadi kondisi keharusan mutlak bagi terbentuknya Indeks Ketahanan Pangan yang optimal. Hal ini membuktikan bahwa ketahanan pangan bersifat multidimensional dan membutuhkan konfigurasi dari beberapa kondisi yang saling berinteraksi. Selain itu, terdapat 6 konfigurasi kombinasi kausal (*Pathway*) yang dijelaskan sebagai berikut;

- a) Pathway satu menggambarkan wilayah dengan harga beras yang tidak optimal, jumlah pasar rakyat yang optimal, persentase penduduk miskin yang tidak optimal, serta prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterjangkauan harga pangan dan kelancaran distribusi logistik sangat didukung oleh kuatnya daya beli masyarakat serta pemenuhan gizi yang baik. Keseimbangan antara stabilitas ekonomi (aksesibilitas) dan ketersediaan infrastruktur fisik ini pada akhirnya berdampak pada kuatnya kemampuan wilayah dalam menjamin ketahanan pangannya secara mandiri, sehingga Indeks Ketahanan Pangan yang optimal terjadi di provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara.
- b) Pathway dua memperlihatkan bahwa terdapat provinsi dengan jumlah pasar rakyat yang tidak optimal, persentase penduduk miskin yang optimal, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan yang optimal, serta luas panen padi yang tidak optimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa wilayah tersebut menghadapi keterbatasan struktural yang kompleks, baik dari defisit ketersediaan fisik produksi, minimnya akses infrastruktur, hingga lemahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Namun, keterbatasan tersebut

mengindikasikan adanya resiliensi wilayah melalui penyesuaian adaptif atau efektivitas intervensi perlindungan sosial yang mampu menjaga wilayah tetap bertahan, sehingga Indeks Ketahanan Pangan yang optimal tetap dapat terbentuk di provinsi Aceh, D.I Yogyakarta, dan Bengkulu.

- c) Pathway tiga menunjukkan bahwa terdapat provinsi yang memiliki harga beras tidak optimal dan luas panen padi yang optimal, namun dihadapkan pada persentase penduduk miskin yang optimal serta prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang optimal. Pathway ini memperlihatkan bahwa tingginya ketersediaan pangan secara fisik dari produksi lokal dan keterjangkauan harga mampu bertindak sebagai penyangga yang krusial. Kelimpahan pasokan panen lokal tersebut mampu memitigasi risiko kerentanan akibat rendahnya daya beli sebagian kelompok masyarakat, yang pada akhirnya memungkinkan wilayah dalam menopang akses pangannya, sehingga Indeks Ketahanan Pangan yang optimal terjadi di provinsi Jawa Tengah, Lampung, dan Jawa Timur.
- d) Pathway empat menggambarkan wilayah dengan harga beras yang optimal, jumlah pasar rakyat yang tidak optimal, persentase penduduk miskin yang tidak optimal, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang tidak optimal, serta luas panen padi yang tidak optimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun wilayah tersebut dihadapkan pada keterbatasan ketersediaan fisik produksi lokal dan tingginya harga pangan pokok, tingginya daya beli masyarakat yang tercermin dari rendahnya angka kemiskinan mampu menutupi kerentanan tersebut. Kemapanan aksesibilitas ekonomi ini memungkinkan masyarakat untuk tetap memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik, sehingga Indeks Ketahanan Pangan yang optimal terjadi di provinsi DKI Jakarta dan Banten.
- e) Pathway lima memperlihatkan bahwa terdapat provinsi dengan harga beras yang optimal, jumlah pasar rakyat yang optimal, persentase penduduk miskin yang tidak optimal, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang optimal, dan luas panen padi yang tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya resiliensi struktural di mana wilayah mengalami defisit kapasitas produksi pangan dan pemenuhan gizi yang belum sepenuhnya merata. Namun, keterbatasan tersebut diimbangi oleh ketersediaan pasar yang memadai serta perputaran ekonomi makro yang kuat (angka kemiskinan rendah). Interaksi ini

membuktikan bahwa ketahanan pangan wilayah dapat digerakkan oleh aksesibilitas ekonomi dan kelancaran pasar, sehingga Indeks Ketahanan Pangan yang optimal terbentuk di provinsi Riau.

- f) Pathway enam menunjukkan bahwa terdapat provinsi yang memiliki harga beras yang optimal, jumlah pasar rakyat yang optimal, persentase penduduk miskin yang optimal, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang tidak optimal, serta luas panen padi yang optimal. Pathway ini memperlihatkan bahwa tingginya ketersediaan panen lokal yang didukung oleh infrastruktur pasar rakyat yang memadai bertindak sebagai instrumen penyangga utama. Kelancaran distribusi dan melimpahnya pasokan di pasar terbukti efektif dalam menjaga ketercukupan konsumsi masyarakat, meskipun daya beli masyarakat masih terbatas akibat tingginya tingkat kemiskinan dan harga beras, sehingga Indeks Ketahanan Pangan yang optimal terjadi di provinsi Sumatera Selatan.

5.2 Saran

a) Aspek Teoritis

- Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel ketahanan pangan lainnya dengan metode yang berbeda agar terlihat pola kausal yang paling dominan dalam menjelaskan Indeks Ketahanan Pangan secara lebih menyeluruh.
- Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan metode *ordered probit* atau ekonometrika spasial untuk menganalisis kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terhadap tingkat Indeks Ketahanan Pangan yang diklasifikasikan secara ordinal dari tingkat rendah hingga tinggi.
- Dengan keterbatasan fsQCA yang hanya menjelaskan konfigurasi kondisi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi pendekatan lain agar dapat mengukur besaran pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat Indeks Ketahanan Pangan suatu wilayah.

b) Aspek Teoritis

Secara praktis, provinsi dengan luas panen padi dan jumlah pasar rakyat yang tinggi harus memastikan bahwa meningkatnya ketersediaan fisik tersebut

diiringi dengan efisiensi rantai pasok, akses harga yang adil bagi petani maupun konsumen, dan penggunaan anggaran ketahanan pangan yang efektif, agar melimpahnya produksi yang tersedia benar-benar bermanfaat secara merata bagi pemenuhan gizi masyarakat lokal. Selain itu, provinsi dengan tingkat kemiskinan yang sangat rendah dan aksesibilitas ekonomi yang baik dapat mengoptimalkan kapasitas ketahanan pangannya melalui perluasan program bantuan pangan bersubsidi, pemanfaatan kerja sama logistik antardaerah, dan penggunaan platform tata niaga untuk mendukung stabilitas harga. Secara umum, pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk memperkuat kerja sama antara program stabilisasi logistik pangan dan kebijakan pengentasan kemiskinan agar karakteristik infrastruktur dan ekonomi yang optimal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memahami kondisi masyarakat dan mendukung ketahanan pangan wilayah di Indonesia.